

KUALITAS PEMBELAJARAN SEKOLAH DASAR MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Farid Ahmadi
Universitas Negeri Semarang
farid@mail.unnes.ac.id

Abstract

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) belakangan ini mengusik masyarakat. MEA diyakini sebagai era di mana orang “bebas-sebebasnya” berbisnis tanpa aturan dan etika. Siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang punya modal ia yang berkuasa. Lalu, di mana peran pendidikan? Adanya dinamika seperti itu, pemerintah, parpol, birokrat, dan masyarakat menanti kiprah dan membebaskan lembaga pendidikan untuk menjawabnya. Padahal MEA adalah masalah kompleks yang harus dicari solusinya bersama-sama. Oleh karena itu, pendidikan yang begitu luas, lembaga pendidikan yang berjenjang, tidak bisa tutup mata dan lepas tangan. Dalam konteks ini, pendidikan dasar, prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan juga Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) mau tidak mau, bisa tidak bisa harus dapat menjawab tantangan MEA. Solusinya, dengan meningkatkan kualitas LPTK, kualitas guru dan pembelajaran di kelas.

Kata Kunci : MEA, pembelajaran, Sekolah Dasar

PENDAHULUAN

Pendidikan dasar sebagai jenjang pendidikan pertama sebelum pendidikan menengah, atas dan tinggi, sudah pasti menjadi landasan awal penanaman intelektual, spiritual dan kecerdasan emosional bagi siswa. Tidak sekadar kompetensi secara *skill* saja, namun juga menanamkan karakter positif bagi pelajar. Namun, apakah sudah berjalan seratus persen hal itu? Apa yang perlu dibenahi? Tentu banyak hal.

Jika diibaratkan rumah, SD adalah fondasi paling dasar yang sangat menentukan kokohnya rumah tersebut. Pendidikan dasar menjadi penentu masa depan pendidikan bangsa. Bagaimana tidak, sebelum beranjak ke SMP, SMA dan perguruan tinggi, pelajar harus mendapat modal awal di SD, baik ilmu pengetahuan maupun moral. Hal itu

tidak lain adalah dari spirit guru. Intinya guru SD harus berubah, baik dipaksa atau dari lubuk hati sendiri.

Sebagai kawah penyemai karakter, yang paling penting dan utama adalah guru SD. S. Sandt (2007) menjelaskan perilaku guru sangat memengaruhi perilaku siswa. Kecerdasan guru juga berdampak pada kecerdasan siswa. Rumusnya jelas, kualitas pembelajaran sangat menentukan kualitas pelajar. Dalam hal ini perilaku guru dipengaruhi 3 hal, yaitu *teachers attitude*, *teacher knowledge* dan *teacher view and beliefs*. Perilaku guru perlu diubah dari “pemberi materi” ke arah memfasilitasi siswa untuk belajar dan “pembentuk karakter”. Jadi tidak hanya cerdas, namun juga memiliki “kesalehan intelektual”.

Hal tersebut perlu dilakukan, dengan melakukan perubahan paradigma

behaviorisme menuju konstruktivisme. Perubahan pandangan yang semula siswa sebagai objek pembelajaran, sekarang harus menjadi subjek pembelajaran dan perubahan pandangan dari *teacher centered learning* ke *student centered learning*. Semua guru SD di negeri ini harus memiliki misi mengubah paradigma dan ketertinggalannya. Hukumnya sangat wajib. Jika tidak demikian, bagaimana dengan kondisi pendidikan di negeri ini? Pasti semrawut.

Kualitas guru mutlak ditingkatkan dan mutu pembelajaran harus terus dipacu. Mengapa? Era global dengan adanya MEA, semua kompetensi saat ini ukurannya tidak lagi ukuran nasional apalagi lokal. Akan tetapi, semua standarisasi dalam dunia akademik, dunia kerja, dunia bisnis, semua berkualifikasi internasional. Di sinilah pendidikan harus mampu menjawabnya dan semua itu kuncinya ada di tangan guru, terutama guru SD sebagai jenjang pertama kali di pendidikan.

Konstitusi sudah menjelaskan, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 8 Undang-Undang No. 14/2005). Permendiknas RI No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru juga menegaskan guru harus memiliki 4 kompetensi yang disyaratkan, yaitu kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial dan profesional. Wujud nyata yang harus dilakukan guru SD adalah mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan. Hal itu bisa dilakukan tindakan reflektif dengan indikator kompetensi yaitu mampu melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus-menerus, memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka keprofesionalan,

melakukan penelitian tindakan kelas, penelitian kuantitatif, kualitatif bahkan penelitian pengembangan serta mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.

Guru SD harus selalu mengikuti zaman, menemukan hal baru dan mampu menjawab tantangan global. Fakta di lapangan berbeda dengan harapan, jangankan profesional, masih banyak guru tidak melek teknologi, gaptek, kuno, tidak mau berubah, buta dengan PTK, RPP dan modul pembelajaran. Hal ini sangat ironis. Jika pendidiknya tidak profesional, bisa dipastikan kemajuan pendidikan akan terhambat. Dalam jangka panjang, Indonesia akan tertinggal jauh dibandingkan dengan negara lain. Puncaknya, di era MEA, orang berpendidikan di Indonesia hanya menjadi “penonton” saja.

Tanpa guru SD berkualitas, pendidikan akan semakin bias. Tanpa pembelajaran bermutu, kualitas pendidikan menjadi semu. Di atas segalanya, peningkatan kualitas pembelajaran menjadi kunci menjawab tantangan MEA. Sebab, sebegus apa saja kurikulumnya, semewah apapun gedung dan fasilitasnya, jika gurunya tidak bermutu, kualitas pembelajarannya buruk, maka pendidikan Indonesia akan selalu terbelakang dan tertinggal dan pasti “terseok -seok” dengan hadirnya MEA. Itu pasti! Untuk itu, tujuan penulisan artikel ini antara lain: mendeskripsikan posisi pendidikan dasar di era MEA, merumuskan upaya peningkatan kualitas LPTK, dan merumuskan upaya meningkatkan kualitas pembelajaran SD

PEMBAHASAN

Posisi Pendidikan Dasar di Era MEA

Pendidikan kita seharusnya memiliki visi 2030, 2050 bahkan 2100. Mengapa? Tantangan zaman generasi saat ini berbeda dengan generasi tiga puluh tahun bahkan lima puluh tahun mendatang. Jangankan yang akan datang, saat ini dengan hadirnya MEA juga sudah berbeda dengan lima tahun yang lalu. Sebab, selama ini pendidikan diakui sebagai jembatan untuk menuju kesuksesan. Tanpa pendidikan berkualitas, sekaya apapun negara akan susah maju bahkan akan terbelakang.

Kita tentu ingat sejarah kemajuan negara Jepang. Dengan kekayaan alam yang sedikit, namun sejak Hiroshima dan Nagasaki dibom tahun 1945, masyarakat di sana mengutamakan kualitas guru dan pendidikan, sekarang kita bisa melihat kemajuan Jepang saat ini. Hampir semua alat elektronik ternama adalah buatan Jepang. Dalam sejarahnya, ketika Jepang luluh lantak akibat bom Sekutu di Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945, yang pertama ditanyakan Kaisar Hirohito adalah berapa jumlah guru yang tersisa, bukan jumlah dokter, jumlah hakim dan jumlah harta yang tersisa. Hal itulah yang seharusnya dicontoh bangsa ini dengan mementingkan guru.

Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas untuk memajukan kehidupan bangsa. Maka maju atau mundurnya peradaban negara ditentukan baik atau buruknya kualitas pendidikan di negara tersebut. Pendidikan dasar menjadi penentu kemajuan pendidikan tingkat selanjutnya. Lalu, bagaimana kualitas pendidikan dasar di Indonesia?

Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain sangat jauh, seperti contoh Finlandia. Guru SD di Finlandia minimal harus berpendidikan magister (S2). Melihat

kondisi riil SD saat ini yang masih jauh dari harapan ideal, guru harus selalu meningkatkan kualitas diri dengan melanjutkan studi, mengikuti pelatihan, seminar, berdiskusi dalam rangka memperbaiki kualitas pembelajaran.

Secara geografis, pemerataan guru di daerah-daerah terpencil dan pelosok menjadi permasalahan terbesar. Parahnya lagi, meskipun pemerintah menyebutkan banyak guru sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi masih banyak pula guru belum menjadi PNS, ditambah banyaknya guru honorer yang mendapatkan gaji hanya rata-rata ±Rp. 500.000,- sebulan bahkan di desa-desa, ada yang hanya Rp. 75.000,- sampai Rp. 100.000,-. Ironis!

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mengalokasikan 20% untuk pendidikan, namun pendidikan dasar masih didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Besar dana pendidikan dalam APBD sangat terbatas, kecuali DKI Jakarta. Semua APBD masih mengandalkan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Akibatnya, fasilitas pendidikan dasar hanya SD di DKI Jakarta saja yang dapat dikatakan memadai dan mapan, meskipun masih jauh dari standar internasional. Lalu, bagaimana dengan daerah di luar DKI Jakarta? Tentu mengesankan selain kota-kota besar seperti Bandung, Medan, Surabaya, Semarang dan Jogjakarta.

Berdasarkan data yang dirilis Scimago Journal & Country Rank (2011), pada tahun

1997, kualitas pendidikan Indonesia menempati peringkat ke 39 dari sejumlah 49 negara yang disurvei. Satu dekade kemudian (tahun 2007), kualitas

pendidikan Indonesia merosot menjadi peringkat ke 53 dari 55 negara yang disurvei. Padahal anggaran pendidikan sudah meningkat selama masa reformasi, karena dipatok sebesar 20% dari APBN. Namun mengapa kualitas pendidikan bangsa ini tidak kunjung membaik? Dari hasil survei yang dilakukan berdasarkan publikasi ilmiah (1996-2009) posisi Indonesia juga tidak beranjak.

Pada tahun 2010, Indonesia berada di posisi 64 dan tahun 2011 tetap di posisi 64 dari 70 negara. Negara-negara lain bisa maju, seperti Malaysia pada tahun 2011 di posisi 44 dan pada tahun 2010 di posisi 48. Ada pun Banglades lebih unggul dari Indonesia di posisi 62. Thailand dan Singapura juga lebih unggul dari Indonesia. UNESCO lewat Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2011 merilis indeks pembangunan pendidikan atau Education Development Index (EDI) berdasarkan data tahun 2008 adalah 0,934. Nilai itu menempatkan Indonesia di posisi ke-69 dari 127 negara (Ester Lince Napitupulu dan Try Harijono, 2013: 14).

Sementara untuk kawasan ASEAN, Indonesia belum mampu menembus dominasi Singapura, Malaysia dan Thailand dalam berbagai penilaian mutu pendidikan. Misalnya, dalam pengukuran kemampuan Sains, Matematika, dan membaca lewat Program for International Student Assessment atau TIMS untuk siswa usia 15 tahun, Indonesia berada di urutan bawah (Atika Nafriyanti, 2014: 2). Fakta ini sangat memukul guru dan harus menjadi bahan refleksi untuk memperbaiki pendidikan.

Tantangan demi tantangan juga menanti Indonesia. Mari kita bermimpi dan berhitung. Pikiran kita sekarang harus

melampaui rata-rata pemikiran manusia pada umumnya. Salah satunya kita harus memiliki visi 2030 bahkan 2050. Selama ini pendidikan diakui sebagai “jembatan” menuju kesuksesan. Musuh besar bangsa ini adalah pengangguran dan kemiskinan. Jika visi pendidikan tersebut mampu menjawab tantangan besar abad milenium (Millenium Development Goals/MDG), maka di tahun 2015 nanti semua anak di Indonesia bisa menikmati sekolah dasar (A. Ferry T Indratno (Ed), 2007: 97). Hal itu tampaknya belum seratus persen tercapai. Namun upaya pemerintah semakin menggeliat dengan melakukan berbagai program termasuk SM3T dalam rangka memenuhi kebutuhan guru di daerah terpencil.

Pelaksanaan MEA yang sudah dimulai pada tanggal 31 Desember 2015 lalu, menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dengan transformasi kawasan ASEAN menjadi pasar tunggal dan basis produksi, sekaligus menjadikan kawasan ASEAN lebih dinamis dan kompetitif. Pemberlakuan MEA dapat dimaknai sebagai harapan akan prospek dan peluang bagi kerjasama ekonomi antarkawasan dalam skala yang lebih luas, melalui integrasi ekonomi regional kawasan Asia Tenggara, yang ditandai dengan terjadinya arus bebas (*free flow*) barang, jasa, investasi, tenaga kerja dan modal termasuk pula pendidikan (Eddy Cahyono, 2014). Masalah-masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia harus dicari solusinya, sehingga mutu pendidikan di negeri ini dari waktu ke waktu lebih baik. Hal itu tidak hanya masalah kualitas guru, namun berkaitan juga dengan sistem, kurikulum, standar nasional pendidikan, sarana dan sebagainya. Solusinya bisa secara pendekatan konseptual

dan teknis, mendasar dan sampai ke akar, salah satunya membenahi SD.

Hayat dan Yusuf (2009: 16) menjelaskan perbaikan secara terus-menerus telah dilakukan pemerintah, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pada 2013, Kemendikbud mengeluarkan kurikulum

2013 yang merepresentasikan perubahan pendidikan. SNP sangat penting dan menjadi perangkat lunak kemajuan pendidikan. SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia yang berfungsi sebagai dasar atau landasan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pendidikan dengan tujuan untuk mewujudkan pendidikan nasional bermutu.

Demi memajukan pendidikan, perlu juga pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan. Standar tersebut meliputi Standar Pengelolaan, Standar Biaya, Standar Sarana Prasarana, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian dan Standar Kompetensi Lulusan (Kemendikbud, 2014:2).

Dari beberapa hasil penelitian, kunci dari kondisi SD di era digital ada pada guru. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu negara menjadi negara maju dan mampu mengatasi permasalahan yang timbul adalah kualitas berpikir masyarakat. Kualitas berpikir yang baik dan terstruktur hanya dapat ditingkatkan melalui pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan sangat penting dan mendesak dilakukan. Salah satu cara meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan meningkatkan kualitas guru, karena guru memiliki “peranan sentral” dalam proses pembelajaran di sekolah. Guru menjadi sopir pendidikan yang bisa membawa ke jalan kemajuan.

Kunci majunya pendidikan ada di tangan guru. Mengapa? Di dalam pembelajaran, misalnya, guru sebagai motivator dan mediator bagi siswa untuk dapat belajar secara efektif dan efisien. Guru harus berperan mendorong siswa belajar dan berkembang. Guru dituntut menjadi revolusioner dalam penguasaan materi dan pembelajaran. Namun kenyataannya, dalam proses belajar mengajar di SD, masih banyak guru menekankan prosedur “pokoknya” dan belum mengajak siswa berpikir dengan menekankan “mengapa” dan “bagaimana” bisa terjadi atas masalah yang dihadapi. Jika demikian, kondisi pendidikan dasar akan sulit berubah apalagi maju (Ibda dan Wijayanti, 2014:22).

Dalam rangka menunjang hal itu, agar bisa mewujudkan Indonesia bebas pengangguran dan kemiskinan, maka diperlukan adanya perbaikan dan sistem berkualitas lulusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Pendidikan dasar secara kualitatif menjadi jawaban atas problematika bangsa. Hal itu lewat formula memperbaiki gurunya. Banyak guru hidup dengan tidak berkecukupan. Hal ini merupakan suatu proporsi yang menuntut pembuktian melalui penelitian (Agus Salim, 2006: 53). Artinya prospek guru SD ke depan harus cerah dan sejahtera. Selain guru SD, guru MI yang lahir dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) juga sama. Dalam hal ini, semua jurusan PGSD/PGMI harus rajin melakukan penelitian dan pengembangan mutu akademik agar lulusannya nanti mampu bersaing dan sejahtera. Jangan sampai jurusan LTPK yang menyelenggarakan jurusan PGSD/PGMI hanya mengejar materi daripada mengutamakan kualitas dan masa depan lulusannya.

Tantangan yang makin “njelimet” tersebut tidak akan terjawab ketika kualitas LPTK dan terutama PGSD tidak mampu memiliki desain modern untuk mencetak calon guru berkualitas. LPTK memiliki tanggungjawab besar dalam mendesain calon guru SD berkualitas yang tidak hanya memiliki 4 kompetensi guru dan 8 keterampilan mengajar. Guru SD di era global ini harus memiliki kemampuan “plus-plus” yang tidak terikat dengan aturan pemerintah. Artinya, regulasi yang telah diatur pemerintah adalah “standar minimal” yang harus dipenuhi guru. Sementara secara personal, guru harus meningkatkan kualitas diri secara personal tanpa dorongan pemerintah.

Peningkatan Kualitas LPTK

Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD merupakan salah satu jurusan/program studi yang dibuka perguruan tinggi atau LPTK yang disiapkan menjadi guru kelas SD. Ahman (2012) menjelaskan PGSD dilahirkan tahun 1990/1991 bertujuan menyiapkan guru-guru SD bertingkat perguruan tinggi yang memiliki profesional dalam beberapa kegiatan yang menentukan, yaitu merancang, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan proses dan sistem pembelajaran di SD. Ekosiswoyo dan Rachman (2000) menjelaskan sejak tahun 2000/2001 dibuka program S1 bagi guru yang telah lulus D2 PGSD dan telah menjadi PNS.

Sementara mulai tahun 2006/2007, PGSD menyelenggarakan kualifikasi S1 PGSD (*Dual Modes*) yang diperuntukkan bagi guru-guru SD yang sudah mendidik. Seperti diketahui, dulu guru SD cukup berpendidikan DII PGSD, namun sejak terbitnya UU No. 14 Tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen (UUGD), guru SD minimal harus berpendidikan S1. Sebelum dibuka S1 PGSD, awalnya sudah ada program D2 PGSD pada tahun 1992 melalui Surat Keputusan (SK) Nomor

400B/DIKTI/Kep/1992. Kemudian dibuka program S1 dimulai tahun 2002 dengan izin operasional Nomor 914/D/T/2002. Pada saat ini telah dibuka pula program Pascasarjana/S2

Program Pendidikan Dasar. Sejak terbitnya UUGD tahun 2005, maka tahun 2006/2007 banyak muncul PGSD di berbagai LPTK, baik negeri maupun swasta.

Sebagai embrio guru SD, PGSD di berbagai LPTK di Indonesia terus melakukan peningkatan kualitas, mutu relevansi produk-produk akademiknya, pengembangan staf, modernisasi sarana-prasarana pendidikan. Dikembangkan juga infrastruktur teknologi informasi, efektivitas dan efisiensi manajemen, pengembangan suasana akademik dan kepedulian pada kualitas dalam komunitas kampus. Salah satu tujuan diselenggarakannya PGSD adalah agar menghasilkan guru SD, baik sebagai guru kelas rendah maupun guru kelas tinggi. Mereka dididik untuk mampu mengembangkan program pendidikan SD sesuai dengan tuntutan masyarakat, meliputi pengembangan konsep pembelajaran, pengembangan karir bidang pembelajaran, melakukan penelitian SD secara terpadu dan mengembangkan program kerja kolaboratif ke-SD-an dengan pihak terkait (Kemdikbud, 2014). PGSD menjadi laboratorium penggemblengan calon guru SD revolusioner dan diharapkan mampu menjawab tantangan zaman. Cita-cita ideal tersebut akan menjadi bumerang jika terlalu banyak lulusan PGSD namun tidak diimbangi perbaikan sistem dan

usaha LTPK serta pengembangan kualitas para lulusan.

Kualitas LPTK

LPTK berkualitas tentu melahirkan guru berkualitas. Hal itu sudah hukum pasti dalam jagad akademik. Sayangnya, kondisi LPTK di Indonesia masih “dianaktirikan” pemerintah dibanding dengan kampus-kampus yang memiliki jurusan non-kependidikan. Dari sisi anggaran, misalnya, dana untuk LPTK sangat kecil dibandingkan kampus lainnya. Hal itu LPTK negeri, apalagi LPTK swasta, nasibnya lebih mengenaskan.

Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Pertama, Kemenristek Dikti harus serius

memperhatikan nasib LPTK, baik dari segi anggaran maupun kualitas pendidikannya. Kedua, Kemenristek Dikti harus memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas dengan memberi peluang beasiswa S2 maupun S3, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Semakin banyak dosen lulusan doktor, maka kualitas lulusan juga menjadi bermutu.

Ketiga, status LPTK harus jelas akreditasinya, baik yang berstatus negeri maupun swasta. Peralunya, selama ini banyak “prodi abal-abal” muncul dan hal itu justru menjadi bumerang bagi lulusannya. Jika prodi tersebut tidak jelas, maka lebih baik dihentikan sementara (Ibda, 2012:19). Sebab, hanya LPTK berkualitas yang mampu melahirkan calon guru berkualitas. Prodi-prodi itu harus jelas akreditasinya dan selalu mendesain pembelajaran sesuai perkembangan zaman. Prodi juga harus memberi pembekalan *soft skill* dan memberi kesempatan *show up* kepada mahasiswa agar khazanah ilmu semakin luas dan mendalam. Mengapa demikian? Banyak potensi mahasiswa tidak berkembang dan stagnan

karena tidak difasilitasi dan didukung kampus.

Keempat, tingginya pendaftar jurusan pendidikan guru tiap tahun harus direspons positif pemerintah, terutama agar momen tersebut dapat dimanfaatkan membangun sistem pemetaan kebutuhan guru yang lebih baik dan terarah. Selama ini masih ada keluhan kekurangan guru di daerah-daerah tertentu. Kelima, calon guru tidak sekadar menguasai kompetensi pedagogi, kepribadian dan sosial dan menguasai 8 keterampilan mengajar. Guru juga tidak hanya dituntut bisa *ngrancang* (merancang) dan *mulang* (mengajar). Namun mereka juga harus “mendidik” dan menjadi orang tua kedua di sekolah. Selama ini banyak guru yang masih “mengajar”, belum sepenuhnya “mendidik”. Mereka belum menjadi pendidik, namun masih pengajar. Guru juga harus selalu meningkatkan kualitas lewat kuliah tambahan, seminar, diklat, rajin mengikuti penelitian, lomba karya tulis ilmiah dan sebagainya. Jika itu terlaksana, guru sebagai mercusuar pendidikan tidak sekadar menjadi mitos.

Keenam, menjadi guru memang bukan profesi untuk menjadi orang kaya. Namun jika ingin mencetak orang kaya, maka jadilah guru. Artinya, sebelum menjadi guru, para mahasiswa harus meluruskan niat berjuang dan mencerdaskan bangsa. Jangan sampai mendaftar di jurusan pendidikan guru hanya berorientasi uang. Para mahasiswa harus menata pola pikirnya. Artinya secara hakikat, “guru tidak mengejar uang, namun uang yang sebenarnya mengejar guru”.

Mahasiswa harus meluruskan niat bahwa kuliah bukan sekadar mencari ilmu, gelar dan harta sebanyak-banyaknya. Hakikat kuliah

adalah menata cara berpikir, mengubah perilaku dan meningkatkan kualitas hidup. Menjadi guru SD juga bukan sekadar mencari regehan dan sertifikasi, namun harus menjadi alat untuk berbuat baik lebih banyak lagi dan mencari kemuliaan di hadapan Tuhan dan manusia. Guru SD bukan segalanya, namun segalanya bisa berasal dari sana.

Sesuai UUGD, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UUGD, 2005: 1-2). Dalam konteks ini, guru SD secara tegas harus berpendidikan S1 PGSD dan wajib revolusioner. Dandan Supratman (2014) menjelaskan guru SD merupakan petugas awal menanamkan karakter, etika dan moral. Guru SD berpendidikan S1 saja tidak cukup, karena hal itu hanya berkaitan dengan kualifikasi akademik sesuai UUGD. Jika perlu, guru SD harus kuliah S2 dan S3. Dengan kesadaran berjuang, semua mahasiswa guru SD harus mampu mencari formula untuk menjadi guru revolusioner dan profesional di bidang intelektual dan moral.

3. Kualitas Pembelajaran SD

Diakui atau tidak, kualitas pembelajaran di SD atau MI saat ini masih rendah. Kebanyakan guru SD, menurut Ibda dan Wijayanti (2014:44) di era global seperti ini masih mengidap penyakit-penyakit seperti asal masuk kelas (Asma), asal sampaikan materi urutan kurang akurat (Asam Urat), di kelas anak-anak remehkan (Diare), gaji nihil jarang aktif dan terlambat (Ginjal), kurang disiplin (Kudis), kurang strategi (Kusta), kurang terampil (Kram), lemah sumber (Lesu), mutu amat lemah (Mual), tidak punya selera (Tipus), tidak bisa computer (TBC)

dan sebagainya. Penyakit-penyakit tersebut bukan saja menghambat kemajuan pendidikan, tetapi juga menjauhkan apresiasi dan interes masyarakat terhadap guru dan pendidikan. Semua guru dan calon guru sejak dini harus introspeksi atau berobat ke dokter akademik. Artinya, meskipun secara jasmani sehat, namun secara edukatif rohaniah masih banyak guru mendera penyakit-penyakit di atas.

Berbicara pembelajaran di SD tentu erat kaitannya dengan pendekatan pembelajaran, model, metode, strategi, teknik dan media pembelajaran. Di era MEA seperti ini guru harus bisa menjawab tantangan tersebut dengan pendekatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Penguasaan TIK bagi guru profesional adalah syarat mutlak. Pasa 1 20 (b) Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memerintahkan agar guru meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Oleh karena itu, kualitas pembelajaran di sini yang dimaksud adalah kualitas perangkat yang disiapkan guru, dan utamanya kualitas gurunya. Tanpa input yang berkualitas, maka selamanya hasil belajar siswa akan buruk. Guru SD di era MEA seperti ini harus mampu mendidik murid bagaimana cara menghidupkan keinginan untuk aktif berprestasi. Apalagi, setiap anak memiliki hak untuk tumbuh menjadi orang besar dan sukses. Tugas guru di sini adalah membantu mereka menemukan jalan termudah sesuai aturan yang ada. Bukan malah membuat murid merasa sekolah itu hanya formalitas yang di dalamnya tersimpan kesulitan-kesulitan dunia, kesulitan mengerjakan PR, tugas-tugas sekolah, tes,

praktikum dan lainnya. Pada dasarnya murid menyukai pembelajaran serius tetapi dengan santai. Melalui pembelajaran menyenangkan dan tidak mencekam, siswa akan lebih banyak mendapatkan pengalaman bermakna. Apalagi, anak SD harus suka belajar sambil bermain.

Setidaknya, guru SD/MI harus menjadi *quantum teacher*. Ciri-ciri tersebut menurut Bobbi Deporter (2012; 156-157) meliputi: 1. Antusias; menampilkan semangat untuk hidup; 2. Berwibawa; menggerakkan orang; 3. Positif; melihat peluang setiap saat; 4. Supel; mudah menjalin hubungan dengan semua siswa; 5. Humoris; berhati lapang untuk menerima kesalahan; 6. Luwes; menemukan lebih dari satu cara untuk mencapai hasil; 7. Menerima; mencari di balik tindakan dan penampilan untuk menemukan nilai-nilai inti; 8. Fasih; berkomunikasi dengan jelas, ringkas dan jujur; 9. Tulus; memiliki niat dan motivasi positif; 10. Spontan; dapat mengikuti irama dan tetap menjagahasil; 11. Menarik dan tertarik; mengaitkan setiap informasi dengan pengalaman hidup siswa dan peduli akan diri siswa; 12. Menganggap siswa “mampu”; percaya akan dan mengorkestrasi kesuksesan siswa; 13. Menetapkan dan memelihara harapan tinggi; membuat pedoman kualitas hubungan dan kualitas kerja yang memacu siswa untuk berusaha sebaik mungkin.

Sebenarnya masih banyak inovasi, kreativitas guru yang bisa dimunculkan dan pengembangan instrument pembelajaran yang bisa diteliti dan diterapkan di SD. Dalam hal ini yang paling penting adalah spirit guru untuk menjadi guru hebat dan teladan bagi siswa- siswa SD/MI. Jika perangkat pembelajaran itu kerang sepeda motor, maka mesinnya adalah ruh dan spiritnya guru. Sebagai “sopir” di dalam kelas, guru menentukan langkah dan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, selain kualitas pembelajaran yang menyesuaikan

zaman, guru juga harus dituntut “tidak kaku” karena yang dihadapi adalah anak-anak.

Ada beberapa komponen utama pembelajaran menyenangkan sesuai dengan Panduan Sertifikasi Guru Rayon XII UNNES (2011: 1-2) sebagai berikut: 1. Kurikulum dan perangkatnya; 2. Sarana dan prasarana yang diperlukan; 3. SDM, yaitu guru dan tenaga kependidikan lainnya; 4. Manajemen yang tertib, teratur, transparan dan akuntabel; 5. Didukung penilaian berkelanjutan.

Semua itu perlu diarahkan pada standardisasi mutu pendidikan secara berkelanjutan dalam menghadapi tuntutan lokal, nasional dan global juga perlu dukungan berbagai pihak. Namun yang paling penting adalah pembelajaran di kelas yang harus didesain guru dengan baik. Banyak media untuk menjadi bahan belajar guru dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran SD. Saat ini antara SD Negeri dan SD swasta juga ketat persaingannya. Bahkan, SD atau MI juga sudah berbasis Islam Terpadu (IT) yang labelisasinya justru sangat menjual, seperti SDIT dan MIT. Konsep terpadu di sini ditawarkan dengan program yang unggul. Artinya, tidak hanya secara fasilitas, namun kurikulum dan pembelajarannya sudah menggabungkan antara materi umum dan agama. Selain itu, adanya ekstrakurikuler juga mendukung pembelajaran dan hal itu menjadi nilai plus bagi SD/MI.

Semua itu adalah dalam rangka membangkitkan pendidikan dan jika sudah bangkit, maka siap menghadapi MEA yang sudah berjalan. Kebangkitan pendidikan dasar dalam rangka menjawab tantangan MEA bisa berawal dari misi pendidikan nasional. Meskipun kurikulum sering berganti, namun pendidikan nasional harus mampu membangun SDM terdidik itu sendiri. Mereka harus memiliki kecerdasan komprehensif, kompetitif, mandiri, amanah dan produktif. Selanjutnya, setiap misi bidang kajian harus diaplikasikan dalam

pengembangan SDM. Oleh karena itu, bidang kajian keilmuan perlu dilakukan secara terpadu untuk mencapai kompetensi komprehensif, intelektual, sosial, moral dan iman. Seharusnya semua sistem pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi berjalan demikian. Pasalnya . pendidikan itu mengembangkan ilmu dan membangun peradaban. Tanpa pendidikan, peradaban manusia tidak berbeda dengan peradaban hewan.

SIMPULAN

Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia di jenjang pendidikan dasar. Namun itu semua akan sia-sia jika gurunya tidak memiliki paradigma siap, memahami paradigma didik dan paradigma ajar sebagai acuan mengembangkan pembelajaran yang harus sesuai dengan kondisi zaman. LPTK yang membuka jurusan PGSD maupun PGMI juga harus menangkap sinyal MEA. Artinya, semua standardisasinya dan KKNi harus sesuai dengan kebutuhan zaman. Jika banyak LTPK hanya berburu “kuantitas” saja, maka sangat mustahil bisa mencetak guru digital yang mampu menjawab tantangan zaman.

Adanya penyakit-penyakit yang didesa guru saat ini, harus dibasmi dengan resep dari kesadaran meningkatkan kualitas. Tidak hanya memenuhi standar kualifikasi S1 PGSD/PGMI, namun guru harus ada geliat untuk meneliti, membaca, menulis dan utamanya membenahi kualitas pembelajaran.

Kualitas pembelajaran di SD harus ditingkatkan dengan memperbanyak khazanah dan variabel dari bentuk pendekatan, model, metode, strategi dan media pembelajaran yang kontemporer, berbasis TIK, dan berstandar internasional. Sebab, MEA mengharuskan semua

kompetensi pendidikan berstandar internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, Edi. 2014. “Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Peran Birokrasi” (Diakses dari: <http://setkab.go.id/peningkatan-dayasaing-ekonomi-dan-peran-birokrasi> diakses 27 Maret 2017).
- Deporter, Bobbi, dkk. 2012. *Quantum Teaching: Mempraktikkan Quantum Learning di Ruang - ruang Kelas*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Ekosiswoyo, Rasdi dan Rachman, Maman. 2000. *Manajemen Kelas Sesuai dengan Kurikulum DII PGSD*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Hayat, Bahru dan Suhendra Yusuf. 2010. *Mutu Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ibda, Hamidulloh dan Wijayanti, Dian Marta. 2014. *Siapkah Saya Menjadi Guru SD Revolusioner?* Depok: Kalam Nusantara.
- _____. 2012. “UU PT dan Tanggung Jawab Pemerintah”. *Wawasan*. 16 Juli 2012. Tahun 27. Hal. 4.
- _____. 2012. “Mencegah Munculnya Kampus Abal-abal”. *Suara Merdeka*. 22 September 2012. Tahun 63. Hal. 19.
- _____. 2014. “Harapan Baru Kuliah PGSD”. *Koran Muria*. 1 Agustus 2014. No. 392. Tahun II. Hal. 23.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Kompetensi Dasar Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)*. Jakarta: Kemdikbud.
- Nafridayanti, Atika. 2014. “Peran Pemerintah Terhadap Anggaran Pendidikan untuk Kualitas Sekolah di Indonesia Melalui Dana APBN.” *Makalah*. Universitas Gunadarma. Depok,

- 20 Mei 2014.
Napitupulu, Ester Lince dan Harijono, Try. 2013. "Besarnya Anggaran Tak Sesuai Kemajuan."
Kompas. 23 Mei 2013. Hlm.6.
Salim, Agus. 2006. *Bangunan Teori: Metodologi Penelitian untuk Bidang Sosial, Psikologi dan Pendidikan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Sandt, S. 2007. "Research Framework on Mathematics Teacher Behaviour: Koehler and Grouws' Framework Revisited". *Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education*, (34), 343-350.
Supratman, Dandan. 2014. *Pendidikan Moral Berbasis Pendidikan Bahasa dengan Strategi Portofolio*. Semarang: Unnes Press.
Tim Penyusun. 2011. *Panduan Sertifikasi Guru Rayon XII Unnes*. Semarang: Unnes Press.

Sumber lain

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Jakarta: Diperbanyak Kemendiknas.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Jakarta: Diperbanyak Kemendiknas.
Permendikbud Nomor 62/2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan untuk Penataan Guru. Jakarta: Diperbanyak Kemendikbud.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru bukan Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Diperbanyak Kemendikbud.
Pedoman Sertifikasi Kompetensi

Pendidik 2004. Semarang: Diperbanyak Unnes.

Surat Keputusan Bersama Lima Menteri (Menteri Pendidikan Nasional, Men PAN dan Reformasi Birokrasi, Mendagri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama) Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN -RB/10/2011, NOMOR 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011 dan Nomor 11 Tahun 2011, Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Diperbanyak Kemendiknas.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2006. Jakarta: Diperbanyak oleh PT Armas Duta Jaya. Jakarta: Diperbanyak Kemendiknas. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 . Jakarta: Diperbanyak Kemendiknas.